

PEMERINTAHAN DIGITAL

untuk

Birokrasi Berdampak



Arahan Presiden Joko Widodo Tentang **Reformasi Birokrasi**



1.

Birokrasi yang
Berdampak



2.

Reformasi Birokrasi
**Bukan Tumpukan
Kertas**

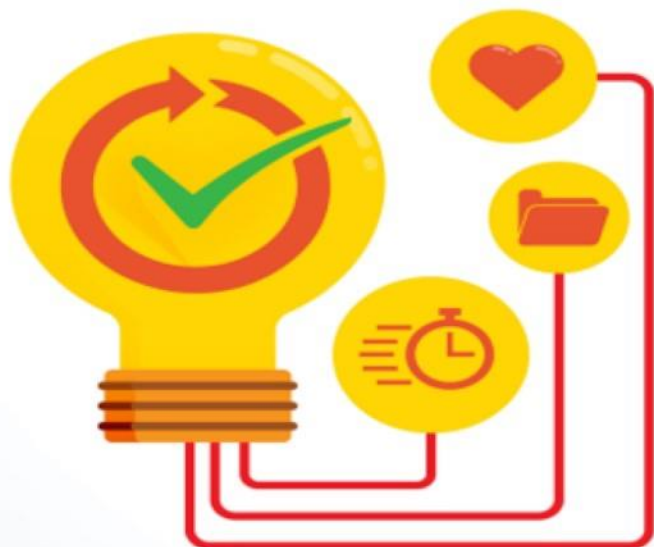


3.

Birokrasi **Lincah
dan Cepat**

(Ditopang Pemerintah Digital Berbasis Data)

PENYEDERHANAAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI: FOKUS DAMPAK KINERJA, BUKAN ADMINISTRASI LAPORAN



Sebelumnya
(Permenpan 26/2020)

Fokus pada aspek **hulu** (tata kelola internal birokrasi), cenderung administratif.

Harus menjawab 259 Komponen pertanyaan, dan mengunggah ribuan dokumen, sebagian akhirnya dikerjakan konsultan.



Mulai 2023

Fokus pada aspek **hilir** (menyelesaikan problem rakyat), dengan tetap mengedepankan tata kelola internal yang baik.

Menghitung 26 indikator dampak: kemiskinan, investasi, digitalisasi, belanja produk dalam negeri, pengendalian inflasi, dan sebagainya.



Dampak Penyederhanaan Evaluasi RB:

Menghilangkan penilaian mandiri (PMPRB) yang selama ini menyita sumberdaya hingga Rp300 juta per pemda (untuk konsultan, rapat, dsb), sehingga bisa menghemat total Rp100-150 M per tahun untuk seluruh Pemda.



SPBE SEBAGAI LEVERAGE TRANSFORMASI DIGITAL NASIONAL

KERANGKA KERJA
PERPRES 95/2018
meliputi seluruh
unsur-unsur SPBE

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah **penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi** untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.



TUJUAN SPBE

- Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel.
- Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.
- Meningkatkan keterpaduan dan efisiensi penyelenggaraan SPBE.

DAMPAK SPBE

Terwujudnya hasil berbagai program prioritas pemerintah seperti:

- pengentasan kemiskinan
- pemberantasan korupsi
- peningkatan investasi
- penggunaan produk dalam negeri



Peraturan Presiden tentang Arsitektur SPBE Nasional, sebagai payung hukum keterpaduan penyelenggaraan pemerintahan berbasis SPBE

URGENSI PENYELENGGARAAN SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)



Memudahkan Warga Mengakses Layanan Publik

Terdapat **± 27.000 Aplikasi**: Warga harus bikin banyak akun dan isi banyak data untuk akses layanan publik.



Menaikkan Indeks Persepsi Korupsi, Tingkat Kemudahan Berbisnis, & Indeks Penegakan Hukum

SPBE yang baik akan mampu mengerek berbagai indikator penting bagi terciptanya pemerintahan yang bersih dan efektif.



SPBE TIDAK HARUS MENAMBAH APLIKASI

Perlu dihindari:
**Satu Inovasi,
Satu Aplikasi**



PELAYANAN EKSTERNAL:
Warga tidak harus download begitu banyak aplikasi, bikin begitu banyak akun, isi berulang begitu banyak data.

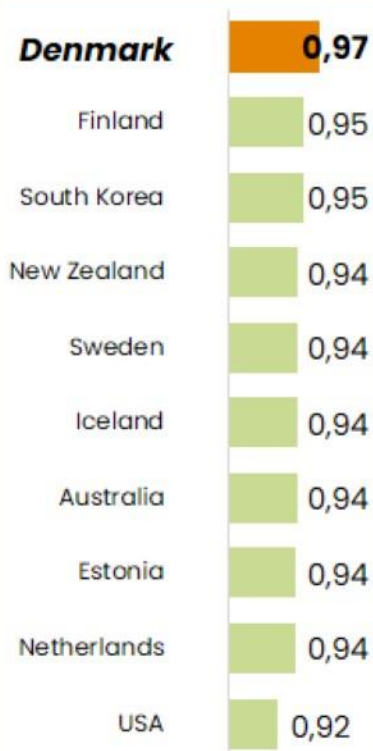


PELAYANAN INTERNAL:
Integrasi/interoperabilitas antar-sistem di lingkup pemerintahan.

KETERKAITAN PENYELENGGARAAN SPBE DENGAN

PEMBERANTASAN KORUPSI, KEMUDAHAN BERUSAHA, PENYELENGGARAAN PENEGAKAN HUKUM

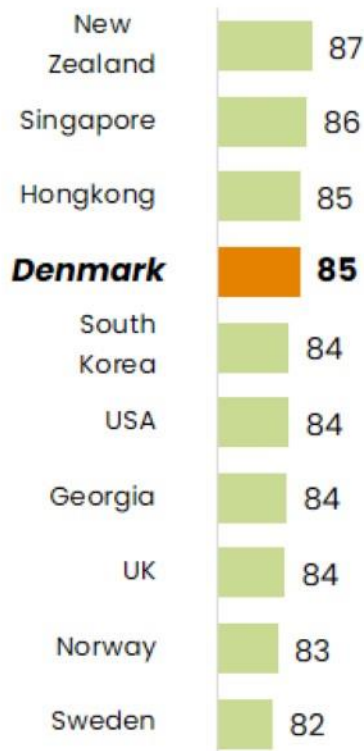
Indeks Pembangunan E-Government/
E-Government Development Index 2022



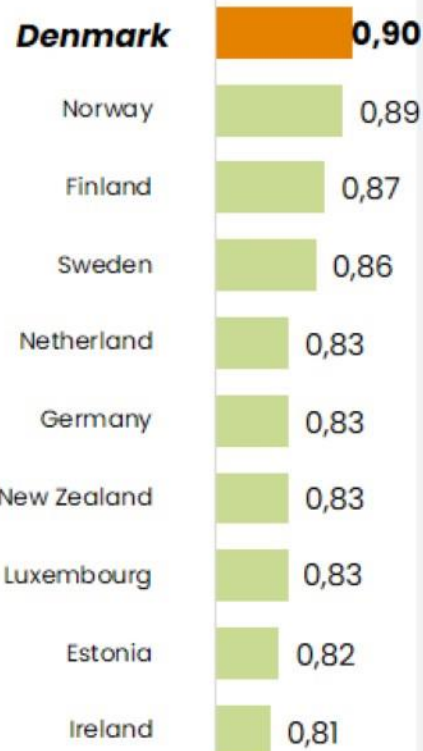
Indeks Persepsi Korupsi/
Corruption Perceptions Index 2022



Tingkat Kemudahan Berusaha/
Ease of Doing Business 2020



Indeks Penegakan Hukum/
Rule of Law Index 2022



Peningkatan Nilai EGD Index selaras dengan pencapaian peringkat:

1. Indeks Persepsi Korupsi (CPI),
2. Tingkat kemudahan dalam berusaha (EODB),
3. Indeks Penegakan Hukum (Rule of Law Index).



SALINAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 132 TAHUN 2022

TENTANG

ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK NASIONAL.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) dan Pasal 74 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional;

Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN PRESIDEN TENTANG ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK NASIONAL.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.

2. Arsitektur . . .

SK No 158198 A



Perpres Arsitektur SPBE Telah Ditandatangani Bapak Presiden Joko Widodo

Bukti komitmen pemerintah mengakselerasi implementasi integrasi proses bisnis, data & informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE & keamanan SPBE untuk Pencegahan korupsi & peningkatan kualitas pelayanan publik

Kerangka Kerja ARSITEKTUR SPBE

DEFINISI

Kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, aplikasi, infrastruktur SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan pemerintah yang terintegrasi

MANFAAT

- ✓ Menghilangkan tumpang tindih proses bisnis pemerintahan
- ✓ Menerapkan **standardisasi TIK dan standarisasi kualitas layanan digital Nasional** (*Service Level Agreement*)
- ✓ Memudahkan **integrasi layanan pemerintah, melalui mekanisme interoperabilitas**, sehingga menumbuhkan-kembangkan **inovasi proses bisnis** dan layanan baru
- ✓ Berbagi data dan informasi sesuai kebijakan **Satu Data Indonesia**
- ✓ Menghilangkan **duplikasi aplikasi dan infrastruktur TIK**, serta memperkuat Keamanan Informasi
- ✓ Meningkatkan keselarasan perencanaan dan penganggaran SPBE, sehingga **meningkatkan efisiensi dan efektivitas penerapan SPBE**



PENERAPAN ENTERPRISE ARCHITECTURE INTERNATIONAL BENCHMARK




Denmark

Indeks EGD
#1 untuk tahun 2018, 2020, & 2022

Danish Government Enterprise Architecture Framework - *Offentlig Information Online*
Enterprisearkitektur (OIO EA) - 2003

Portal pelayanan publik terpadu (**borger.dk**)
Digital ID - MitID





Inggris

Indeks EGD
#1 untuk tahun 2016

The cross-Government Enterprise Architecture (xGEA), 2005

Portal pelayanan publik terpadu (**gov.uk**)
Digital ID - DSIT






Korea Selatan

Indeks EGD
#1 untuk tahun 2010, 2012, & 2014

Government-wide Enterprise Architecture Framework (GEAF) - 1999

Portal pelayanan publik terpadu (**gov.kr**)
Digital ID - Mobile ID Card






Singapura

Indeks EGD
#12 untuk tahun 2022, index 0,9133

Singapore Government Enterprise Architecture (SGEA) - 1980

Portal pelayanan publik terpadu (**smartnation.gov.sg**)
Digital ID - Singpass






Indonesia

idEA
Indonesia Enterprise Architecture

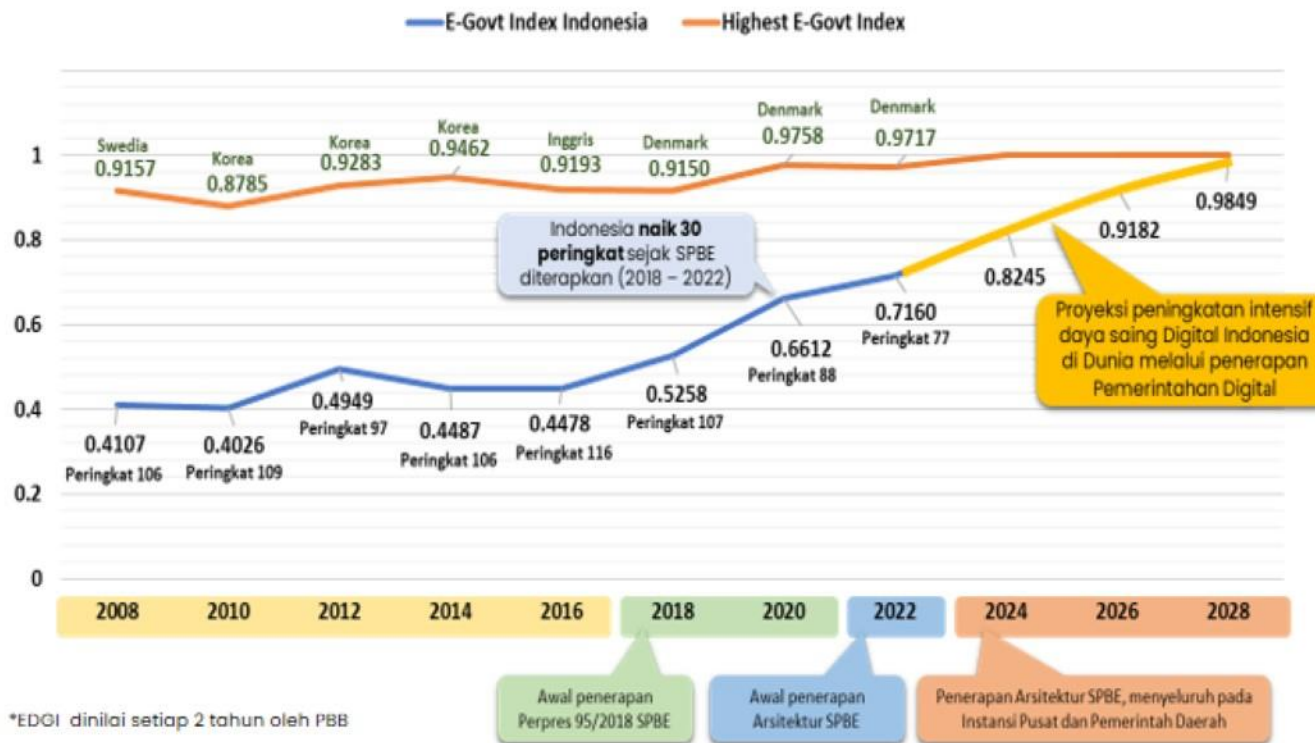
Arsitektur SPBE Nasional 2022 (Perpres 132/2022)

Portal pelayanan publik terpadu (**MPP-Digital**)
Indonesia Digital ID



5 DAMPAK PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN BERBASIS DIGITAL DALAM KERANGKA SPBE:

1. Peningkatan e-Government Development Index (EGDI)



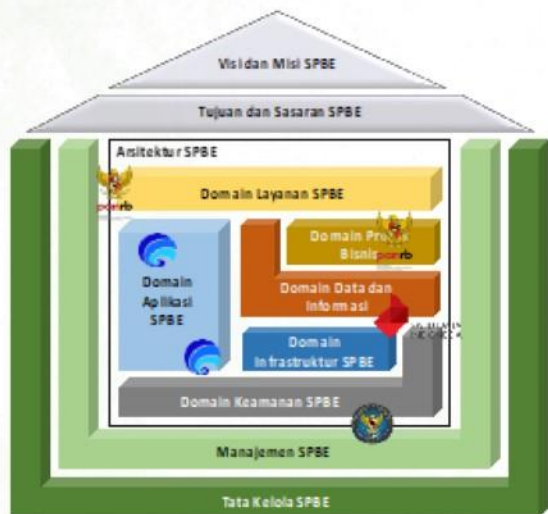
*EGDI dinilai setiap 2 tahun oleh PBB

2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
3. Berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemberantasan Korupsi
4. Efisiensi Belanja TIK Nasional, melalui Pemanfaatan Infrastruktur TIK Berbagi Pakai (Pusat Data Nasional)
5. Peningkatan capaian *GovTech Maturity Index (GTMI)* oleh Indonesia, pengukuran oleh World Bank pada Lembaga pemerintah dalam menerapkan inovasi teknologi terbaru



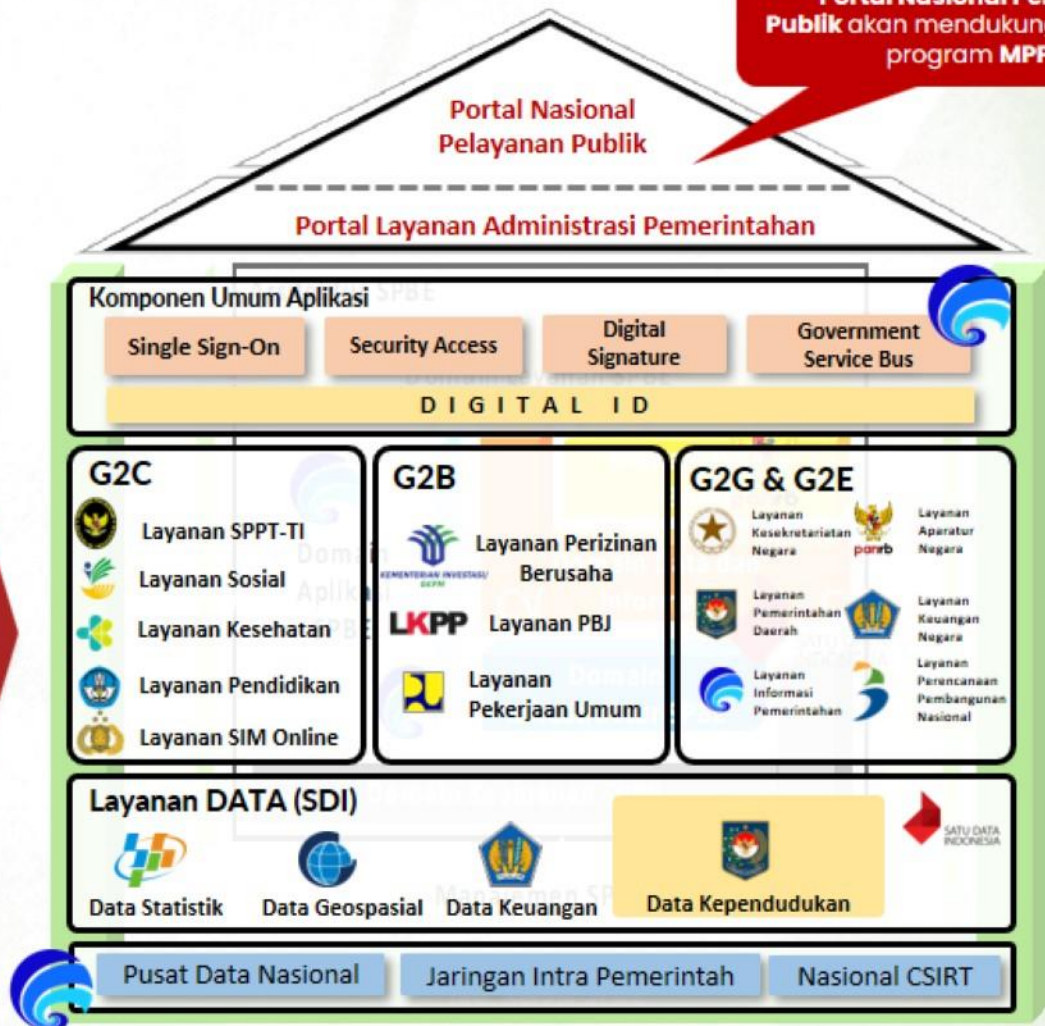
TRANSFORMASI DIGITAL PELAYANAN PUBLIK

Portal Nasional Pelayanan Publik akan mendukung dalam program MPP-Digital

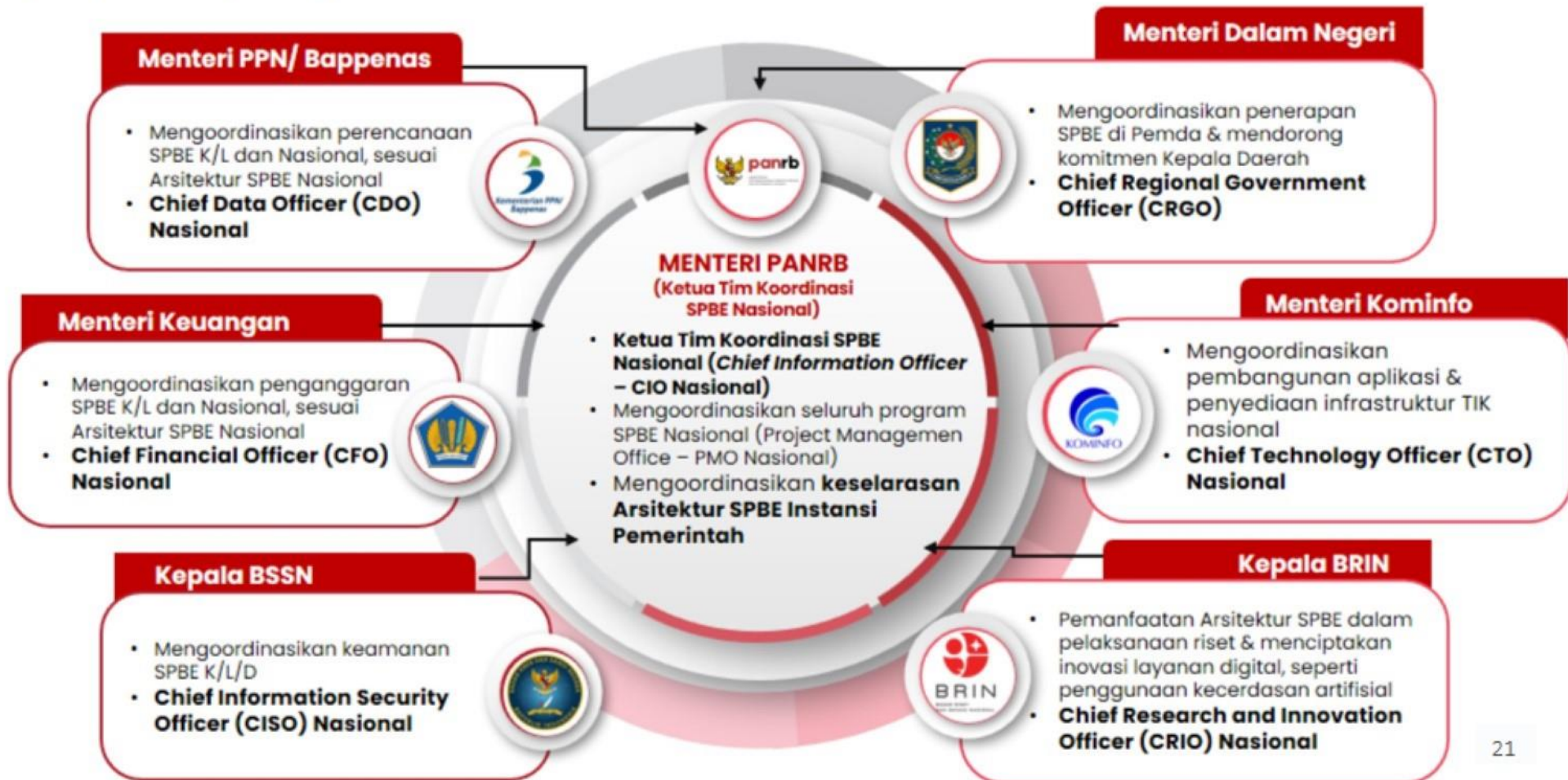


Inisiatif Strategis 2024

Melalui arsitektur SPBE, tidak mengutamakan pembangunan aplikasi baru, tetapi memastikan **interoperabilitas antar aplikasi existing** menjadi layanan digital pemerintah yang terpadu (berupa **platform digital nasional**, dengan **mengintegrasikan e-services berbagai instansi**)



PERAN TIM KOORDINASI PERCEPATAN PENERAPAN SPBE (Perpres 95/2018)



ORKESTRASI KEMENKO DALAM LAYANAN DIGITAL NASIONAL



Percepatan penanganan program nasional melalui kolaborasi lintas sektor & dapat semakin dipercepat dengan **orkestrasi layanan digital**

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Kemanusiaan dan Kebudayaan

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi



TIMELINE PENERAPAN INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE NASIONAL HINGGA TAHUN 2024

PILOTING TEMATIK LAYANAN TW II:

1. SPPT-TI
2. Layanan data statistik (Registrasi Sosial & Ekonomi)
3. Layanan transportasi

Konsolidasi platform digital, melalui e-Services untuk **Tematik Layanan Digital menjadi MPP-Digital** oleh Instansi terkait

Optimalisasi MPP Digital

Pengembangan lebih lanjut **MPP Digital** yang sejalan dengan penyelenggaraan **tematik layanan digital**

Pembangunan **platform digital**, didasarkan atas **Arsitektur SPBE**, untuk menjadi layanan terpadu

TW I
2023

TW II
2023

TW III
2023

TW IV
2023

TW I
2024

TW II
2024

TW III
2024

TW IV
2024

PILOTING TEMATIK LAYANAN TW I:

1. *Check-point* pada bandara (imigrasi, kesehatan)
2. Penyelenggaraan Haji
3. Perencanaan pembangunan
4. Pemerintahan daerah
5. Manajemen ASN

Operasional **Portal Nasional Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan** dengan fitur Komponen Umum Aplikasi, **berbasis Nasional Digital ID**, dengan referensi utama Data Kependudukan

Operasional pada **infrastruktur TIK berbagi pakai** (Pusat Data Nasional, Sistem Penghubung Layanan Pemerintah)

Change management untuk *piloting* implementasi

Operasional fitur **big data & kecerdasan artifisial** dalam layanan digital pemerintah

POTRET PERMASALAHAN PELAYANAN PUBLIK




Laporan terkait **administrasi kependudukan** menjadi salah satu topik terbanyak dalam kanal pengaduan nasional pada kurun 3 tahun terakhir



SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL

Laporan atas kendala pelaksanaan pelayanan publik berbasis elektronik (*e-services*)

10.799 Laporan

-  Tidak dapat diakses/dibuka
-  Tidak bisa *log in*
-  *Error/Bug*

*Sumber: Data SP4N-LAPOR! Tahun 2020-2022

2020

-  **Coronavirus**
-  **Pendidikan**
-  **Ketenagakerjaan**
-  **Administrasi Kependudukan**
-  **Layanan Keuangan Digital**

Total laporan masuk: 195.438 laporan

2021

-  **Administrasi Kependudukan**
-  **Bantuan Sosial**
-  **Ketenteraman / Ketertiban Umum**
-  **Konten Penipuan**
-  **Sistem Penagihan Fintech**

Total laporan masuk: 160.476 laporan

2022

-  **Bantuan Sosial**
-  **Ketenteraman / Ketertiban Umum**
-  **Pendidikan dan Kebudayaan**
-  **Konten Penipuan**
-  **Administrasi Kependudukan & Pencatatan Sipil**
-  **Kartu Prakerja**

Total laporan masuk: 113.989 laporan

*Sumber: Data SP4N-LAPOR! Tahun 2020-2023

Pelayanan Konvensional/Fisik

Meski berbagai layanan telah berada dalam satu tempat/lokasi, namun sistem & data masih **terfragmentasi** pada masing-masing instansi sehingga masyarakat perlu menyerahkan data berulang-ulang.

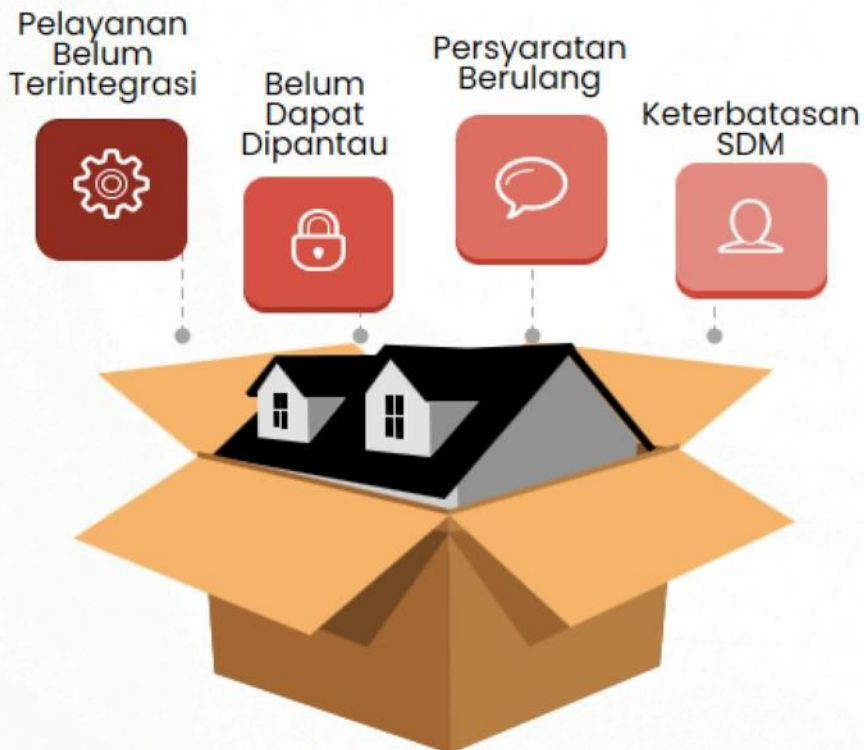


Tidak **efektif** - Tidak **efisien**
Tidak **user-friendly**

Pelayanan Publik Berbasis Elektronik

Masyarakat harus mengunduh terlalu banyak aplikasi/mengakses web yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat (tidak *user-friendly*), **tidak saling terintegrasi** sehingga tetap harus mengisi data berulang-ulang.

URGENSI MPP DIGITAL



Perbedaan kemampuan dan dukungan
teknologi Pemerintah Daerah

Mal Pelayanan Publik sebagian besar berupa “layanan satu atap”, berbagai instansi memberikan layanan di lokasi yang sama tetapi **belum terintegrasi** satu sama lain (*fragmentasi layanan*).

Masyarakat perlu menyerahkan data **persyaratan berulang-ulang** akibat tidak adanya keterhubungan proses bisnis.

Beragamnya kapasitas Pemerintah Daerah dalam penyediaan **sumber daya** untuk penyelenggaraan MPP.

Sulitnya **memantau kinerja** MPP secara *real-time* karena perbedaan sistem data dan informasi antar MPP satu dengan yang lain.

DAMPAK PENERAPAN MPP DIGITAL

SEBELUM

Masyarakat mengisi data berulang-ulang

Masyarakat harus membuat banyak akun di berbagai aplikasi pemerintah (*e-services*)

Masyarakat harus datang langsung ke lokasi untuk mengakses layanan



SESUDAH

Masyarakat hanya cukup sekali *input* data

Masyarakat hanya butuh **1 akun untuk berbagai e-services berbasis data NIK/KTP-Digital***

Layanan bisa diakses dimanapun, kapanpun, melalui berbagai perangkat elektronik

MPP Digital menghadirkan penyelenggaraan pelayanan yang **efektif & efisien**

4 Ekosistem Pelayanan Terintegrasi: Ditargetkan di 150 Kab/Kota pada 2024



Direct Services (Pelayanan Langsung)

Interaktif antara pelaksana dan penerima pelayanan



Electronic Services (MPP Digital)

Pelayanan interaktif menggunakan teknologi informasi



Self Services (Pelayanan Mandiri)

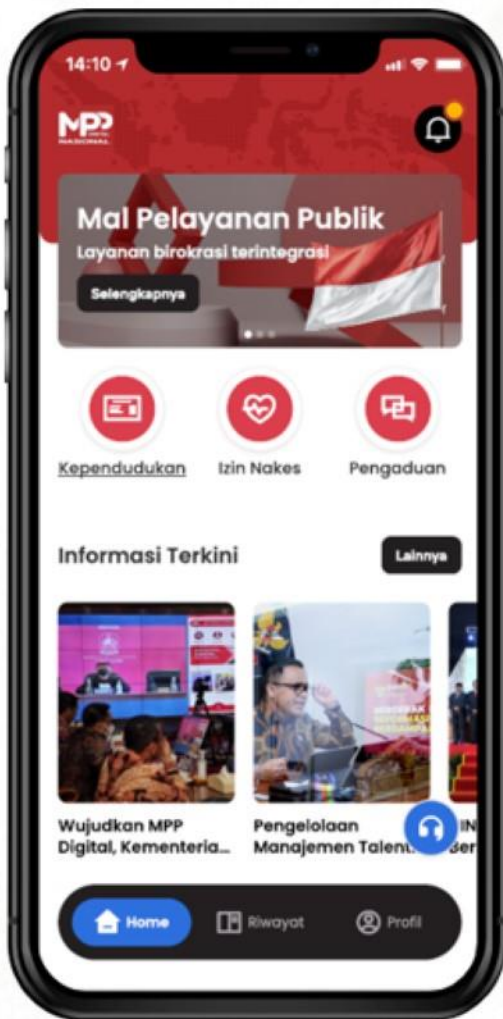
Pelayanan yang dilakukan sendiri



Mobile Services (Pelayanan Langsung)

Pelayanan bergerak menggunakan sarana transportasi



MPP Digital
merupakan pelayanan
publik berbasis
elektronik **Pemerintah
Daerah** yang
terintegrasi dalam **satu
aplikasi**



Fitur-Fitur Utama

- Pengajuan Permohonan Layanan
- Tracking* Layanan
- Riwayat Layanan
- Pengaduan Layanan
- Profil Pengguna
- Notifikasi

Layanan Tahap Awal

-  Administrasi Kependudukan
-  Perizinan Tenaga Kesehatan

Didukung oleh:





DUKUNGAN PERCEPATAN SPBE & REFORMASI BIROKRASI BERDAMPAK

Koordinator Bidang Politik, Hukum, & Keamanan

- ✓ Mengoordinasikan percepatan integrasi Layanan **Penanganan Perkara Tindak Pidana Terpadu Berbasis TI** dan penyelesaian inisiatif strategis SPBE pada lingkup Politik, Hukum, dan Keamanan

Koordinator Bidang Pembangunan Manusia & Kebudayaan

- ✓ Mengoordinasikan percepatan penyelesaian inisiatif strategis SPBE pada lingkup Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Koordinator Bidang Perekonomian

- ✓ Mengoordinasikan percepatan penyelesaian inisiatif strategis SPBE pada lingkup Perekonomian

Koordinator Bidang Kemaritiman & Investasi

- ✓ Mengoordinasikan percepatan penyelesaian inisiatif strategis SPBE pada lingkup Kemaritiman & Investasi

Pimpinan K/L dan Pemda

- ✓ Melakukan seluruh inisiatif strategis yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan *timeline* yang telah ditetapkan

Menteri Keuangan

- ✓ Memberikan dukungan anggaran untuk percepatan penerapan inisiatif strategis SPBE (**termasuk dukungan penguatan operasional pengelolaan Data Kependudukan**)
- ✓ Memberikan Dana Insentif Daerah untuk mendorong pelaksanaan RB di daerah

Menteri Dalam Negeri

- ✓ Memperkuat penerapan SPBE di pemerintah daerah
- ✓ Mempercepat pemanfaatan data kependudukan dalam mendukung penerapan Digital ID yang dikembangkan oleh Kominfo
- ✓ Mendukung adanya optimalisasi unit yang melaksanakan fungsi transformasi strategis di daerah

Menteri Komunikasi dan Informatika

- ✓ Mempercepat pembangunan portal nasional pelayanan publik pada **akhir bulan Juni 2023** & Nasional Digital ID berbasis data kependudukan & layanan imigrasi, serta penyediaan infrastruktur TIK berbagi pakai (Pusat Data Nasional)

Menteri PPN/Kepala Bappenas

- ✓ Sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dalam penerapan inisiatif strategis SPBE
- ✓ Mendorong kolaborasi K/L dalam pelaksanaan RB Tematik

Menteri PANRB

- ✓ Melakukan koordinasi & sinkronisasi pelaksanaan penerapan SPBE
- ✓ Mendukung adanya optimalisasi unit yang melaksanakan fungsi transformasi strategis

Menteri BUMN

- ✓ Memperkuat konsolidasi dan sinkronisasi penerapan SPBE terpadu dengan penugasan kepada BUMN, antara lain Telkom, Mandiri, Peruri, dll.

Kepala BRIN

- ✓ Mendukung inovasi pemanfaatan Big Data & Kecerdasan Artifisial dalam layanan digital pemerintah

Kepala BSSN

- ✓ Memastikan keamanan informasi pada layanan digital pemerintah

Kepala BPKP

- ✓ Melakukan audit efektivitas pemanfaatan layanan digital pada seluruh Instansi Pusat & Pemda

Penguatan dukungan instrumen kebijakan dalam bentuk Instruksi Presiden



ARAHAN STRATEGIS SPBE SUMMIT 2023

- 01 Pembangunan Layanan Digital berbasis Masyarakat (*citizen centric*).
- 02 Penguatan Tim Koordinasi SPBE Instansi menjadi *Digital Transformation Agent* (DTA) dalam memastikan manajemen perubahan dan operasional layanan digital.
- 03 Moratorium Pembangunan Aplikasi dan mengutamakan peningkatan efektivitas pemanfaatan aplikasi yang telah beroperasi.
- 04 Konsolidasi Aplikasi menjadi *Platform* Digital Terpadu, baik di inter maupun antar instansi pusat dan daerah.
- 05 Penyederhanaan proses bisnis menuju Tematik Layanan Digital.
- 06 Interoperabilitas Data dan Aplikasi melalui Pemanfaatan Arsitektur SPBE.

Masa depan pemerintahan digital Indonesia yang diharapkan dapat diwujudkan dengan penerapan seluruh unsur-unsur SPBE secara terpadu yang dilakukan oleh seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah secara kolaboratif.

Senangnya... sambil sarapan bisa memperpanjang STNK, dapat salinan akte kelahiran anak secara daring, dan juga bayar PBB di aplikasi digital pemerintahan.




Dulu mengurus persuratan lama sekali prosesnya. Sekarang saya dapat mengurus persuratan saat perjalanan dinas. Waktu menderab, surat tersebut sudah selesai diolah dan disetujui oleh semua pihak terkait.



Sekarang ini memperpanjang izin usaha sangat efisien. Saya sudah tidak perlu ke kantor perizinan dan ketemu banyak petugas. MPP daring memudahkan proses kerja dengan layanan teknologi yang ramah.



PENYEDERHANAAN JABATAN UNTUK BIROKRASI LINCAH

	Sebelum	Kini	
 Jabatan Pelaksana	3.414 Klasifikasi	3 Klasifikasi (Permenpanrb 45/2022, 11 Okt 2022)	 Berdampak pada kelincahan mobilitas 1,4 juta ASN
 Jabatan Fungsional	<ul style="list-style-type: none">● ASN hanya bisa pindah dalam satu rumpun.● ASN disibukkan pengisian angka kredit dan pengajuan DUPAK (Daftar Usul Penetapan Angka Kredit) (Permenpanrb 13/2019, 29 Juli 2019)	<ul style="list-style-type: none">● ASN bisa pindah lintas rumpun sehingga birokrasi jauh lebih lincah.● Tak ada lagi pengisian DUPAK yang cenderung administratif. Sehingga ASN bisa total mengejar capaian organisasi. (Permenpanrb 1/2023, 6 Jan 2023)	 Berdampak pada kelincahan 2,1 juta ASN



KONSULTASI DARING

Pangkas Perjalanan Dinas Pemda

 **panrb**
Kementerian PANRB

AYO IKUTI!

BISA TANYA KEBIJAKAN PANRB

Bagi #RekanASN yang ingin tahu lebih dalam tentang kebijakan Kementerian PANRB

LIVE ON:
 

JADWAL

SELASA Hari SDM Aparatur	PIC: ☎ Benny 085171171925
RABU Hari RB Kunwas	PIC: ☎ Qonita Silmi 081291162111
KAMIS Hari Pelayanan Publik	PIC: ☎ Dimas Mahardika 081312406155
JUMAT Hari Kelembagaan dan Tata Laksana	PIC: ☎ Salvina Herda 085216047888

BerAKHLAK  bersama kami jadi bangsa
menpan.go.id 



> 15.000 ASN

Ikut konsultasi dan penanganan masalah berbasis daring (Nov 2022-28 Feb 2023).



Rp75 Miliar

Potensi Efisiensi perjalanan dinas pemda (asumsi per orang Rp5 juta)



14.700 Balita Stunting

Mendapat bantuan gizi selama setahun dari potensi efisiensi perjalanan dinas tersebut (Rp425.000 per bulan sesuai standar BKKBN dikali 12 bulan: Rp5,1 juta per balita)

JADWAL "BISA TANYA KEBIJAKAN PANRB"

HARI UNIT KERJA



Selasa
Hari SDM Aparatur

PIC: **Benny Alexander**
085171171925



Rabu
Hari Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas & Pengawasan

PIC: **Qonita Silmi**
081291162111



Kamis
Hari Pelayanan Publik

PIC: **Dimas Mahardika**
081312406155



Jumat
Hari Kelembagaan & Tata
Laksana

PIC: **Salvina Herda**
085216047888



JABATAN FUNGSIONAL

INSTANSI PUSAT

- ✓ **DAH IPMA (KETUA POKJA)**
0851-5667-9842

INSTANSI DAERAH

- ✓ **TAMZIL**
0851-5667-9842
- ✓ **ARINTHA**
0851-5667-9842

EVALUASI/KELAS JABATAN

INSTANSI PUSAT

- ✓ **MITA (KETUA POKJA)**
0811-9117-685

INSTANSI DAERAH

- ✓ **RAHMAWITA**
0852-6838-2639
- ✓ **CLAUDIA**
0813-1115-3163
- ✓ **NIKA**
0822-3252-0404

STANDAR KOMPETENSI

INSTANSI PUSAT & DAERAH

- ✓ **IQBAL (KETUA POKJA)**
0857-1666-1555
- ✓ **YUDHA**
0812-2987-3838
- ✓ **THEODORA**
0856-4722-0161

PERENCANAAN/PENGADAAN

INSTANSI PUSAT

- ✓ **HESTI (KETUA POKJA PERENCANAAN)**
0815-1630-645
- ✓ **SURYO (KETUA POKJA PENGADAAN)**
0852-2876-7641
- ✓ **SUHADA**
0857-7516-9107



PERENCANAAN/PENGADAAN

INSTANSI DAERAH

- ✓ **CINDY**
0823-8583-4842
RIAU / KEPULAUAN RIAU / SUMATERA BARAT /
JAMBI
- ✓ **FATHIMAH**
0812-2358-5879
SULAWESI SELATAN / SULAWESI TENGGARA
- ✓ **TANAYA**
0857-2780-0338
DKI JAKARTA / BALI / NTB / NTT
- ✓ **DEWI**
0881-0241-83410
SULAWESI UTARA / GORONTALO /
SULAWESI TENGAH / SULAWESI BARAT
- ✓ **ARKAN**
0812-6786-4545
ACEH / SUMATERA UTARA
- ✓ **VIN**
0813-1759-3831
BANTEN / MALUKU / MALUKU UTARA

INSTANSI DAERAH

- ✓ **KONITA**
0852-7192-5000
JAWA TIMUR
- ✓ **YOGA**
0858-5436-3068
SUMATERA SELATAN / BANGKA BELITUNG /
BENGKULU / LAMPUNG
- ✓ **EVA**
0877-2371-4982
KALIMANTAN BARAT / KALIMANTAN TENGAH /
KALIMANTAN SELATAN / KALIMANTAN UTARA /
KALIMANTAN TIMUR
- ✓ **HARIS**
0857-1767-4876
PAPUA / PAPUA BARAT / PAPUA PEGUNUNGAN /
PAPUA SELATAN / PAPUA TENGAH
- ✓ **ISTI**
0858-5862-9912
JAWA BARAT / D.I. YOGYAKARTA
- ✓ **WIDITA**
0812-2004-4491
JAWA TENGAH

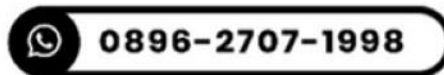
Butuh informasi seputar ASN? **CHATBOT Si PANDay**

- ✓ Core Value & Employer Branding ASN
- ✓ Pengelolaan Kinerja
- ✓ Sistem Kerja
- ✓ Tugas Belajar & Izin Belajar
- ✓ Pengadaan ASN 2022
- ✓ Kebijakan Penanganan Tenaga Honorer

Scan QR berikut:



atau bisa chat ke:



atau akses ke: menpan.go.id





panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI


BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif


**#bangga
melayani
bangsa**





TERIMA KASIH

 @kempnrb

 @kemenpanrb

 www .menpan.go.id

  @Kementerian PANRB